

Anggota Komisi C Bambang Giantoro Sarankan Duduk Bersama Eksekutif Cari Solusi Terbaik Terkait Hibah Bansos

Prijo Atmodjo - KEDIRI.WARTAWAN.ORG

Dec 18, 2025 - 16:02



Anggota DPRD Kota Kediri Komisi C Bambang Giantoro dari Partai Hanura.

Kediri - Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi B dan Komisi C DPRD Kota Kediri dengan Asisten III Bagus Alit, beberapa Kepala OPD yang hadir membahas terkait pencairan Hibah Bansos melalui Pokmas tidak kunjung cair berlangsung di kantor BKPSDM Jalan Himalaya Kecamatan Mojoroto Kota

Kediri, Kamis (18/12/2025).

Hadir dalam kegiatan RDP yakni, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sudjono dan Ketua Komisi B Arif Junaidi, Sekretaris Komisi B Mukti Wibowo, Anggota Eriyanto Djaya, Afif Fachrudin Wijaya, Dody Yustiawan dan Yuzar Rasyid.

Hadir juga Ketua Komisi C Agung Purnomo, Sekretaris Komisi C Katino, Anggota Komisi C Bambang Giantoro dan Choirudin Musthofa.

Dari Eksekutif yang hadir Asisten III Bagus Alit, Kepala Dinkop UMTK Eko Lukmono, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu Purba Kelana dan Inspektur Inspektorat Muchlisin dan Mandung Sulaksono Kepala Dinas Pendidikan.

Bambang Giantoro selaku Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri dari Partai Hanura mengatakan saya menyayangkan terkait hibah bansos tidak kunjung cair.

"Yang mana tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini terjadi ketidak harmonisan antara Eksekutif dan Legislatif. Kalau ini terjadi berlarut-larut maka Pemerintahan Kota Kediri tidak bisa maksimal untuk perkembangannya," ucap Bambang yang juga Ketua DPC Hanura Kota Kediri ini.

Bambang sangat berharap pihak Eksekutif Mbak Wali dan Gus Wawali segera duduk bersama dengan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk membahas tentang hibah bansos.

"Bagaimana baiknya karena hal ini sangat penting sekali, karena hibah bansos ini sebagai wujud dari Anggota Dewan memberikan kepada masyarakat yang sudah dilindungi oleh Undang-undang," ujar Bambang

Dijelaskan Bambang bahwa saat ini kekecewaan dari masyarakat terkait hibah bansos yang dibatalkan atau tidak kunjung cair ini yang dilakukan sepihak oleh eksekutif ini berdampak juga pada anggota dewan terhadap masyarakat juga.

"Hal ini harus dibicarakan dengan baik antara Eksekutif dengan Legislatif, sehingga di luar maupun di dalam terlihat benar-benar baik. Tapi ini hanya terlihat dari luar saja baik, akan tetapi di dalam sebenarnya antara Eksekutif dengan Legislatif tidak baik-baik saja," imbuhnya.

Bambang juga menambahkan saat ini banyak sekali kekecewaan- kekecewaan yang dialami semua anggota dewan. Hal ini menjadikan preseden tidak baik untuk kemajuan Kota Kediri.

"Saya sangat menyayangkan sekali bisa terjadi seperti ini. Dikarenakan, mekanisme hibah bansos mau lewat pokmas atau lewat OPD tidak masalah, selama masih ada kesepakatan eksekutif dan legislatif," tutup Bambang.